

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA



Disampaikan dalam Program IPD-MBKM KEMENDIKBUD RI
Oleh: AOS, S.Sos., M.Si.

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

PENGERTIAN-PENGERTIAN POKOK

Kepemimpinan atau *Leadership*

- a. Kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok
- b. Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh
- c. Kepemimpinan adalah seni untuk menciptakan kesesuaian faham atau kesetiaan, kesepakatan
- d. Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengaruh
- e. Kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku
- f. Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi

- g. Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan / kekuasaan
- h. Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan
- i. Kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi
- j. Kepemimpinan adalah peranan yang dipisahkan
- k. Kepemimpinan sebagai inisiasi dari struktur

Pemerintahan

- Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara
- Pemerintahan adalah perbuatan memerintah

Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum

- "*binnenlandslaestuurs*" yang dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan dalam negeri" dengan tugas pokok menyerasikan dinas-dinas dan instansi-instansi pemerintahan yang bersifat teknis.
- Perubahan bentuk Negara, stelsel pemerintahan atau struktur organisasi, pemerintahan dalam negeri mengalami spesialisasi dengan lahirnya departemen-departemen di pusat dan dinas-dinas atau instansi teknis di daerah-daerah.
- Cakupan tugas Departement Dalam Negeri:
 - (1) fungsi menyerasikan dinas-dinas atau instansi-instansi teknis
 - (2) adanya sisa urusan pemerintahan yang tidak termasuk: urusan salah satu dinas atau instansi teknis.

Komponen-komponen Pemerintahan Demokrasi

- a. Para pemilih
- b. Partai-partai atau kelompok-kelompok kekuatan sosial politik
- c. Badan legislatif
- d. Badan eksekutif
- e. Pejabat-pejabat karir

Memimpin dan memerintah

Kepemimpinan

- Kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang
- Pemimpin lebih banyak mempengaruhi dan mengajak pengikut untuk mengikuti dan memenuhi ajakan-ajakan si pemimpin secara sukarela dan ikhlas

Pemerintahan

- Adanya hubungan manusiawi yang dilandasi rasa tertekan atau terpaksa pada pihak lain.
- Pemerintah lebih banyak bersifat mengharuskan yang didasarkan atas adanya kekuasaan

Variabel-Variabel Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

- a. pemimpin, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan (*leadership*);
- b. pengikut, yaitu sekelompok orang yang berkedudukan untuk mengikuti, atau yang berfungsi kepengikutan (*followership*);
- c. situasi dan kondisi, yaitu keadaan yang melingkungi kepemimpinan dan kepengikutan tersebut

Sikap Dasar dan Sifat-Sifat Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

a. Sikap dasar

- 1) Konsisten dan konsekuen
- 2) Mengayomi

b. Sifat-sifat

- 1) Adil
- 2) Arif bijaksana
- 3) Penuh prakarsa
- 4) Percaya pada diri sendiri
- 5) Penuh daya pemikat
- 6) Ulet
- 7) Mudah mengambil keputusan
- 8) Jujur
- 9) Berani mawas diri
- 10) Komunikatif

Tujuan Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Tujuan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia sejalan dengan cita-cita bangsa yaitu terwujudnya masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat maju yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

(Tujuan Nasional)

Rumusan tujuan formal konstitusional termuat pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945:

Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksana Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Tingkat Pusat

- Kekuasaan membuat undang-undang: DPR
- Kekuasaan pemerintahan Negara: Presiden
- Kekuasaan kehakiman: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

Daerah

- DPRD
- Gubernur/Bupati/Walikota
- Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri

MPR

Sebelum Reformasi (Lembaga Tertinggi Negara)

1. Mengubah dan Menetapkan UUD
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
3. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekarang digantikan oleh UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Setelah Amandemen (Lembaga Tinggi Negara)

1. Menetapkan perubahan terhadap UUD atau melakukan pembentukan UUD yang baru
2. Menetapkan perubahan UUD yang telah dilakukan
3. Melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan hasil pemilu maupun sidang paripurna MPR
4. Melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden berhenti maupun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir
5. Memberikan keputusan terhadap berbagai usulan yang diberikan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan Presiden atau Wakilnya
6. Melakukan pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti
7. Memutuskan dan mengeluarkan peraturan maupun kode etik yang berlaku untuk MPR

Hak MPR

MPR memiliki beberapa hak sebagai berikut:

1. MPR memiliki hak untuk memilih, dipilih dan membela diri
2. MPR berhak untuk mengajukan saran tentang amandemen pasal-pasal di dalam UUD 1945
3. MPR juga memiliki hak untuk menentukan sikap serta pilihannya dalam pengambilan keputusan

Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah

- Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendedayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi atau arti otonomi daerah adalah:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Teknik-teknik Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Menurut Prof. Arifin Abdoelrachman:

- a. Teknik pematangan/ penyiapan pengikut
- b. Teknik human relations
- c. Teknik menjadi teladan
- d. Teknik persuasi dan pemberian perintah
- e. Teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok
- f. Teknik penyediaan fasilitas-fasilitas

Gaya Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

- a. Gaya motivasi
- b. Gaya kekuasaan
 - Gaya otokratik
 - Gaya partisipatif
 - Gaya bebas
- c. Gaya pengawasan
 - Berorientasi
 - Berorientasi kepada produksi

TEORI KEPEMIMPINAN

1. Teori serba sifat

Teori ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi.

Kelemahan :

- diantara pendukung-pendukungnya tidak ada persesuaian atau kesamaan mengenai perincian sifat-sifat dimaksud;
- terlalu sulit untuk menetapkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin;
- sejarah membuktikan bahwa situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat-sifat pemimpin yang tertentu pula. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka dikembangkan teori lain yaitu teori lingkungan.

2. Teori lingkungan (*environmental theory*).

Telah dikemukakan bahwa teori lingkungan ini mengkonstatir bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil daripada waktu, tempat dan keadaan atau situasi dan kondisi.

(“Leaders are made not born“).

3. Teori pribadi dan situasi (*personal-situational theory*);

Penganut teori serba sifat dan teori serba situasi hanya berusaha menjelaskan kepemimpinan sebagai akibat dari seperangkat kekuatan yang tunggal. Adanya akibat-akibat interaktif antara faktor pribadi (individu) dan faktor situasi diabaikan.

4. Teori interaksi dan harapan (*interactionexpectation theory*);

Golongan teori ini mendasarkan diri pada variabelvariabel : aksi, reaksi, interaksi dan perasaan (*action, interaction dan sentiment*).

5. Teori humanistik (*Humanistic theory*);

Teori ini mendasarkan diri pada dalil "*the human being is by nature a motivated organism; the organization is by nature structured and controlled*" (manusia karena sifatnya adalah organisme yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya adalah tersusun dan terkendali).

6. Teori tukar-menukar (*exchange theory*);

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar dalam mana anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imbalan dengan pengorbanan-pengorbanan kelompok atau anggota-anggota yang lain.

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI MANCANEGARA

1. **Kepemimpinan Pemerintahan di Inggris**

Falsafah dan pandangan hidup: individualism

Pemerintahan: sistem demokrasi liberal.

Wakil Rakyat: Badan perwakilan (*parliament*).

Julukan: "Induk Parlementaria" (*Mother of Parliament*)

2. **Kepemimpinan Pemerintahan di Perancis**

Menjadi korban sistem demokrasi liberal, pemerintahannya tidak stabil dan kurang otoritatif. Partai-partai yang jumlahnya banyak saling berkompetisi dan tidak mampu menciptakan koalisi untuk mendukung pemerintahan yang mantap. Berlangsung terus sampai pada Era Republik ke IV, di mana terdapat situasi dan kondisi yang membahayakan.

Pada tanggal 1 Juni 1958 Jenderal Charles de Gaulle diminta untuk menjadi Perdana Menteri dan masih dalam rangka Republik ke Empat. Ia diberi kekuasaan luar biasa oleh Parlemen, termasuk tugas menyiapkan suatu konstitusi baru. Konstitusi Republik ke Lima dimintakan suara rakyat dengan referendum, baik diantara warga negara di dalam Perancis sendiri maupun diantara warga negara di luar Perancis, pada tanggal 28 September 1958, dan mulai berlaku tanggal 4 Oktober 1958.

3. Kepemimpinan Pemerintahan di Amerika Serikat

Memproklamasikan kemerdekaannya lepas dari Inggris pada 4 Juli 1776, yang disusul dengan perang revolusi dan memperoleh pengakuan sebagai bangsa yang berdaulat pada tahun 1783.

Tahun 1787, Sidang Majelis Konstituante menerima dasar demokrasi Amerika, berlaku efektif tanggal 4 Maret 1789 sampai sekarang ialah: Konstitusi (UUD) Amerika Serikat. Amendment sampai dengan tahun 1971 sudah mencapai 26 Amendment.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat, bermaksud menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu sistem diarahkan untuk dapat menjawab tantangan-tantangan yang datang dari paham komunisme dan antidemokrasi lainnya. Sistem pemerintahan disusun sedemikian rupa untuk mampu berkompetisi dengan sistem-sistem lainnya di dunia dalam rangka mempertahankan demokrasi dan kebebasan.

Pembagian kekuasaan/ kewenangan antara cabang-cabang pemerintahan (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) di tingkat Pusat (Federal) dan antara Federal (Pusat) dengan Negara-negara Bagian tersusun team work yang baik.

4. Kepemimpinan Pemerintahan di Uni Soviet/Rusia

Rusia, atau Uni Republik-republik Sosialis Soviet (Union of Soviet Socialist Republics = USSR), adalah suatu super power di dunia merupakan saingan bagi Amerika.

Pemerintahan Rusia sekarang ini lahir sebagai hasil revolusi Oktober/ November 1917, suatu revolusi catur muka.

Pertama, revolusi itu meruntuhkan dan mengganti kekaisaran (Czarism) dan absolutisme politik yang berusia lima abad.

Kedua, revolusi tersebut menghancurkan suatu sistem klas sosial yang sangat pincang dan merombak hubungan di antara klas-klas sosial yang kemudian ada.

Ketiga, revolusi tersebut memperkenalkan industrialisasi yang massif kepada masyarakat petani, kolektivisasi produksi, hak milik dan pertanian serta menciptakan suatu ekonomi berencana dengan ketentuan-ketentuan pemberian penghargaan ekonomis yang ditetapkan Pemerintah.

Keempat, revolusi tersebut membongkar sampai ke akar-akarnya suatu dominasi gereja Katholik Ortodox (Kuno) dan berusaha menggantinya dengan penggerak kehidupan sehari-hari manusia.

5. Kepemimpinan Pemerintahan di Republik Rakyat Cina

Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 pemerintahnya telah mencurahkan perhatian terhadap konsolidasi pemerintahan di wilayah Cina sendiri dan daerah-daerah yang melingkupinya, serta mensosialiskan perekonomian bangsa Cina.

Tibet yang dituntut sebagai wilayah Cina berhasil dikuasai dan dijadikan daerah otonom (*autonomous region*) pada tahun 1965.

Taiwan dan kepulauan Quemay sedang diperjuangkan untuk dikuasai kembali. Pembangunan ekonomi pada mulanya mengikuti model pengalaman Rusia yang ditunjang oleh bantuan teknik dan pinjaman dari Rusia.

Pada tahun 1958 terjadi perubahan strategi yang menyimpang dari model pembangunan Rusia, dimana sistem pembangunan ekonomi baru ini didasarkan atas pengorganisasian petani ke dalam komune rakyat dan penggunaan produksi padat karya sebagai lawan padat modal (*a new system of economic development based on the organization of peasant population into rural communes and the use of labor-intensive as opposed to capital intensive methods of production*).

Strategi baru kurang berhasil dan berbarengan dengan itu sekitar tahun 1961 - 1965 berkembanglah perbedaan ideologis antara Partai Komunis Cina dan Partai Komunis Rusia.